

KEGIATAN DPR-RI AWAL SEPTEMBER 2012

Rangkuman berita kegiatan AKD DPR dalam edisi minggu awal September 2012 ini, memuat berbagai kegiatan di bidang legislasi, anggaran, dan kegiatan dalam rangka HUT DPR-RI ke- 67.

Berikut ringkasannya:

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Ali

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Dalam Rapat paripurna tanggal 30 Agustus 2012, Pimpinan Baleg melaporkan tentang penambahan RUU Prioritas untuk tahun 2012. Yang semula diputuskan sejumlah 64 + 5 RUU Kumulatif Terbuka, menjadi 69 RUU + 5 RUU Kumulatif terbuka. Penambahan itu dilakukan setelah adanya rapat kerja Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM, karena berkaitan dengan perubahan Prolegnas.

Penambahan RUU tersebut, yaitu: [1] RUU tentang Kesehatan Jiwa, diusulkan oleh Komisi IX, [2] RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional dan RUU tentang Kebudayaan, diusulkan oleh Komisi X. [3] RUU Perubahan Atas UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, diusulkan oleh Badan Legislasi. [4] RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, diusulkan oleh Pemerintah. Rapat paripurna menyetujui penambahan tersebut.

Pimpinan Baleg mengatakan, dengan tambahan RUU Prioritas ini, maka Beban Legislasi tahun 2012 menjadi cukup berat. Namun demikian, apabila ada tekad bersama antara DPR dan Pemerintah untuk menyelesaikan Prolegnas, tentunya, target ini akan dapat dicapai. Oleh karena itu, Pimpinan Baleg meminta dukungan dari Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi dan pimpinan Fraksi, agar penambahan RUU Prolegnas 2012, dapat direalisasikan sesuai rencana, sehingga dapat menjadi sumbangan penting dalam peningkatan kinerja DPR. Dalam hari yang sama, telah diselesaikan RUU tentang Keistimewaan DIY. Pada tanggal 29 Agustus, telah diselesaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN. Dengan demikian, pada Masa Sidang ini 2 (dua) RUU telah selesai, diharapkan beberapa RUU yang sudah mengalami perpanjangan beberapa kali belum tuntas, dapat diselesaikan. Antara lain, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan pembalakan liar, RUU tentang Pangan, RUU tentang



Koperasi, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Piutang Negara dan Piutang daerah, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, dan RUU tentang Organisasi Masyarakat.

Masih minimnya capaian produk legislasi pada tahun sidang 2011-2012, oleh Ketua DPR dalam pidatonya tanggal 16 Agustus mengatakan, bahwa perlu perhatian DPR maupun Pemerintah. Dan meminta dorongan dari Presiden agar dapat membantu meminimalisir berbagai hambatan sehingga efektifitas penyelesaian produk legislasi dapat dioptimalkan. Demikian juga kepada fraksi dan anggota dewan, diminta meningkatkan peran untuk bekerja lebih intensif dan efektif dalam pelaksanaan

fungsi ini.

Pembahasan RUUK DIY antara Pemerintah dan DPR, pada masa persidangan III dan IV tahun sidang 2011-2012, masih berkuat soal: mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY. Sementara, pada tanggal 9 Oktober 2012 Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DIY dan Adipati Apku Alam IX selaku Wakil Gubernur sudah berakhir.

Ketua Komisi II melaporkan, dalam pembicaraan tingkat I terdapat beberapa perubahan, antara lain mengenai judul; ketentuan umum; kewenangan; bentuk dan susunan pemerintahan; kebudayaan; pertanahan; tata ruang. Satu hal yang diatur dengan jelas dalam UU ini adalah tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur yang diawali dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan. Juga diatur tentang tata cara pengajuan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang prosesnya dilakukan oleh DPRD DIY. Mengenai persyaratan yang diatur dalam ketuntuan ini, secara umum sama dengan persyaratan bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur di daerah provinsi lainnya. Namun demikian, terdapat penekanan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra; Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

tidak menjadi anggota partai politik.

Hal ini merupakan penegasan bahwa keberadaan gubernur yang juga Sultan Hamengkubuwono dan wakil gubernur yang juga Adipati Paku Alam adalah milik masyarakat DIY tanpa tersekat kelompok politik tertentu, serta sepenuhnya mengabdikan diri bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat DIY.

Dalam RUUK DIY yang telah disetujui untuk disahkan menjadi UU juga telah disepakati peraturan mengenai pertanahan. Yaitu: [1] dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan, Kesultanan dan Kadipaten dinyatakan sebagai “Badan Hukum” yang bersifat khusus, yang merupakan subyek hak yang mempunyai hak milik atas tanah kesultanan dan tanah Kadipaten. Tanah kesultanan dan tanah kadipaten meliputi “tanah keprabon” dan “tanah bukan keprabon”. Adapun tanah keprabon dan tanah bukan keprabon adalah tanah yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.

[2] Selanjutnya, kesultanan dan kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut yang ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Ada dua RUU yang ditangani Komisi IV, yang diusahakan diselesaikan pada Masa Persidangan I 2012-2013 yang mengalami beberapa kali perpanjangan yaitu RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L) dan RUU tentang Pangan. Kedua RUU tersebut secara substansial sudah tidak perlu dipermasalahkan, terutama, untuk RUU P3L berkaitan dengan badan yang berwenang melakukan pemberantasan pembalakan liar. RUU Pangan, juga berkaitan dengan badan pangan. RUU Pangan merupakan perubahan RUU No. 7 tahun 1996, yang muatannya lebih komprehensif dan mengatur seluruh hal yang menyangkut pangan, baik mengenai persediaan pangan maupun keterjangkauan pangan.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Pada tanggal 29 Agustus 2012, Rapat Paripurna DPR telah memberikan persetujuan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011. RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2011 ini disampaikan ke DPR setelah diperiksa oleh BPK-RI. BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP tahun 2011 kepada DPR melalui surat tertanggal 28 Mei. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK RI memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) atas LKPP tahun 2011. Beberapa masalah yang masih ditemukan pada LKPP 2011 adalah: [1] **kelemahan sistem pengendalian intern**, yang terutama disebabkan oleh belum memadainya sistem pengendalian pendapatan perpajakan; sistem pengendalian aset; dan sistem pengendalian atas ekuitas (sisa anggaran lebih/SAL). [2] **ketidapatuhan**



Agus Hermanto Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR-RI ke DIY pada Reses Masa Sidang III Tahun 2011-2012



Demonstrasi warga Jogja menyuarkan aspirasinya mengenai RUUK DIY



Suasana Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013 di Gedung Nusantara DPR RI



terhadap peraturan perundang-undangan, yang terutama disebabkan oleh BNPB pada beberapa kementerian negara/ lembaga terlambat/belum disetor, kurang/belum dipungut dan digunakan langsung diluar mekanisme APBN. Penetapan PBB Migas atas areal onshore tidak sesuai dengan UU PBB dan UU Migas; penerimaan hibah belum dilaporkan pada bendahara umum negara yang dikelola di luar mekanisme APBN; pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan atas 7 perguruan tinggi negeri yang status badan hukumnya dibatalkan oleh MK dan penyelesaian kesepakatan antara Pemerintah, BI, dan Perum Jamkrindo atas risk sharing tunggakan kredit usaha tani (KUT) tahun penyediaan 1998-1999 berlaut-larut.

Dengan temuan permasalahan tersebut, Pemerintah telah menindaklanjuti dengan tindakan: [1] terhadap

kelemahan sistem pengendalian intern dengan berbagai langkah. [2] terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga menindaklanjuti dengan berbagai langkah.

Dalam laporan Ketua Banggar, berkaitan dengan RUU ini, telah menyampaikan ringkasan dari realisasi APBN, neraca dan laporan arus kas. Selain angka-angka dalam LKPP yang telah disepakati, juga telah disepakati dalam draft RUU tentang Pertanggungjawaban APBN tahun anggaran 2011 dimasukkan 8 (delapan) Rekomendasi Badan Anggaran DPR, antara lain; [1] agar pemerintah meningkatkan kualitas laporan keuangan, terutama K/L, yang masih mendapat opini audit "Tidak Menyatakan Pendapat" dan "Wajar Dengan Pengecualian". [2] agar pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2011 yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, terutama temuan terkait inventarisasi dan penilaian atas aset tetap dan aset eks-BPPN. [3] agar pemerintah terus melakukan penilaian kinerja terhadap K/L, berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan anggaran, serta menerapkan sistem pemberian imbalan dan sanksi kepada K/L termasuk satuan kerja pengguna anggaran di lingkungan K/L yang bersangkutan. [4] agar Pemerintah terus melakukan monitoring penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman kepada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif dalam pencapaian kinerja K/L dan pelayanan kepada masyarakat sehingga sasaran pembangunan tercapai. Ketua Banggar melaporkan bahwa dalam pembicaraan tingkat I/raker banggar dengan menteri keuangan, seluruh fraksi menyetujui atau menerima RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2011 untuk disahkan menjadi UU.

Pada pengambilan keputusan atas RUU ini seluruh fraksi menyetujui menjadi UU.**

Perlu Kebijakan Strategis Dan Sinergis Atasi Angkutan Lebaran

Untuk mengatasi dan memperbaiki angkutan lebaran ke depan, diperlukan kebijakan-kebijakan yang strategis dan sinergis yang melibatkan stakeholders di bidang transportasi. Kebijakan ini juga diperlukan mengingat dalam waktu dekat akan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2013.

Ketua Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menyampaikan hal itu saat rapat kerja dengan Menteri Perhubungan dan mitra-mitra yang menangani arus mudik Lebaran, Senin (3/9) di gedung DPR.

Pagi itu, Komisi V DPR menggelar rapat dengan Instansi, Lembaga terkait, para Direksi BUMN dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa transportasi untuk mengklarifikasi dari pihak-pihak terkait sebagai bagian dari upaya mencari solusi yang lebih baik ke depan.

Komisi V DPR perlu menanyakan langkah analisa teknis untuk mengetahui seringkali terjadi kecelakaan pada kawasan-kawasan tertentu, serta solusi apa yang telah dan akan dilakukan dalam rangka mengantisipasi arus mudik berikutnya, baik dalam rangka Lebaran mendatang maupun Natal serta Tahun

Yasti mengatakan, dari tahun ke tahun penanganan arus mudik kondisinya masih saja menuai permasalahan. Tahun ini di samping kemacetan lalu lintas masih terjadi di berbagai jalur, kurangnya fasilitas dan kapasitas angkutan umum yang aman dan nyaman dengan harga terjangkau, dan aspek keselamatan yang seharusnya menjadi aspek paling mendasar seolah terabaikan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kecelakaan dan jatuhnya korban meninggal melebihi angka tahun lalu.

Sesuai dengan data yang terhimpun, korban meninggal sampai dengan 27 Agustus 2012 sebesar 908 jiwa. "Angka ini meningkat 17 persen dari tahun 2011," katanya. Sedangkan total kecelakaan lalu lintas sebesar 7.870 kejadian dan melibatkan pengguna sepeda motor sebesar 70% atau sebesar 5.634 kejadian.

Sementara dari data Kementerian



Ketua Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow (tengah) memimpin rapat kerja dengan Menteri Perhubungan



Suasana rapat kerja komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan

Perhubungan dan Korlantas POLRI tentang Angkutan Lebaran Tahun 2012 hingga tanggal 27 Agustus 2012 menun-

jukkan bahwa penumpang moda angkutan jalan (angkutan umum seperti bus) mengalami kenaikan sebesar 11,31

persen menjadi 5,46 juta penumpang dari 4,9 juta penumpang pada tahun 2011.

Moda angkutan penyeberangan mengalami penurunan sebesar 1,84 persen menjadi 2,98 juta pemudik dari 3,04 juta pemudik pada tahun 2011. Moda angkutan kereta api mengalami kenaikan sebesar 26,15 persen menjadi 2,05 juta penumpang dari 1,62 juta penumpang di tahun 2011.

Untuk moda angkutan udara juga mengalami kenaikan sebesar 18,23 persen menjadi 3,065 juta penumpang dari 2,59 juta penumpang dan angkutan laut mengalami kenaikan sebesar 4,83 persen menjadi 1,15 juta penumpang dari 1,09 juta penumpang di tahun 2011.

Sedang untuk kendaraan pribadi, mobil pribadi mengalami kenaikan sebesar 8,55 persen menjadi 1,56 juta unit dari 1,44 unit pada tahun 2011. Kendaraan sepeda motor mengalami kenaikan sebesar 16,69 persen menjadi 2,64 juta unit dari 2,26 juta unit di tahun 2011.

Dari data tersebut, kata Yasti, terlihat bahwa persentase penggunaan kendaraan pribadi (mobil dan sepeda

motor) peningkatannya lebih besar dari pada pengguna moda transportasi angkutan umum.

Pada kesempatan tersebut, Komisi V DPR memprihatinkan tingginya angka kecelakaan yang berakibat jatuhnya korban jiwa, khususnya yang melibatkan kendaraan sepeda motor.

Data kecelakaan lalu lintas Operasi Ketupat (POLRI) H-7 (12 Agustus 2012) sampai dengan H+8 (27 Agustus 2012) menunjukkan terjadi peningkatan kejadian kecelakaan sebesar 10 persen menjadi 5.233 kasus kecelakaan dari 4.744 kasus kecelakaan di tahun 2011.

Jumlah korban meninggal dunia meningkat sebesar 17 persen menjadi 908 jiwa dari 779 jiwa pada tahun 2011 dan jumlah korban luka berat meningkat sebesar 13 persen menjadi 1.505 orang dari 1.334 orang di tahun 2011.

Komisi V tidak memungkiri, telah ada tindakan antisipasif atau tindakan preventif yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan arus mudik Lebaran 2012, misalnya dengan manajemen rekayasa dan operasional lalu lintas terhadap titik-titik rawan macet dan kecelakaan.

Namun tidak dapat dipungkiri juga,

realitas menunjukkan masih tingginya angka kecelakaan yang terjadi.

Berkaitan dengan hal itu, Komisi V DPR perlu mengundang seluruh pihak yang terkait untuk memperoleh data dan informasi yang lebih komprehensif mengenai hasil penanganan arus mudik Lebaran 2012, sekaligus membahas bersama-sama agar kejadian-kejadian serupa dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Kebijakan Yang Dilakukan

Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan diantaranya kebijakan di bidang transportasi darat, melakukan percepatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana jalan.

Kebijakan di bidang transportasi udara dengan melakukan optimasi jam operasi bandara dan mengantisipasi lonjakan penumpang dengan layanan angkutan udara tidak berjadwal.

Di bidang kereta api, pihaknya telah mengambil kebijakan salah satunya peningkatan kapasitas angkutan KA dengan penetapan jadwal perjalanan sementara (maklumat KA), di samping jadwal reguler.

Kebijakan di bidang transportasi laut, yaitu dukungan pengoperasian kapal negara (Hubla) dan kapal TNI AL dalam rangka mengatasi kekurangan kapasitas kapal berdasarkan kebutuhan yang nyata.

Selain itu, kata Mangindaan, Kementerian Perhubungan juga melakukan penertiban calo tiket di semua moda.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan penyelenggaraan angkutan Lebaran di masa mendatang, Mangindaan menyampaikan beberapa usulan kebijakan diantaranya, untuk jangka pendek menekan penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi mudik.

Adapun jangka menengah yang diusulkan adalah membangun budaya mudik setiap tahun menjadi 2 (dua) tahun dan jangka panjang dengan pembangunan fly over pada perlintasan sebidang, pemerataan pembangunan pada daerah dan relokasi pasar tumpah atau pembangunan jalan lingkar. (tt) foto: wy/parle



Ketua Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow (tengah) memimpin rapat kerja dengan Menteri Perhubungan

Komisi V Desak Pemerintah kaji Sepeda Motor sebagai Transportasi Jarak Jauh

Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengkaji keselamatan dan keamanan penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi jarak jauh (mudik).

Komisi V DPR RI memprihatinkan terjadinya peningkatan kasus kecelakaan selama periode penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2012/1433 H yang tercatat mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, khususnya kecelakaan sepeda motor yang mencapai 71% dari total kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Demikian salah satu kesimpulan rapat yang disampaikan Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow saat rapat kerja dengan Menteri Perhubungan dan jajarannya serta mitra kerja lainnya yang menangani arus mudik Lebaran, Senin (3/9) di gedung DPR.

Komisi V DPR RI juga mendesak kepada Menteri Perhubungan selaku Koordinator Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tingkat Nasional agar mempersiapkan penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu untuk tahun mendatang dimulai dari selesainya analisis evaluasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2012/1433 H ini dengan menyampaikan penyempurnaan rekomendasi kepada Komisi V DPR RI.

Pada kesimpulan berikutnya, Yasti menyampaikan Komisi V DPR RI sepakat dengan Pemerintah untuk pemberian subsidi (PSO) angkutan khusus untuk sepeda motor dalam periode penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu pada tahun mendatang, dengan menggunakan moda pengangkutan Kereta Api, Kapal Laut dan angkutan darat.

Rapat kerja Komisi V DPR dengan mitra-mitra terkait yang berlangsung hingga sore hari membahas Evaluasi penanganan arus mudik Lebaran Terpadu.

Berdasarkan data dari Korlantas Polri angka kecelakaan yang terjadi pada mudik Lebaran Tahun 2012 san-

gat memprihatinkan. Jumlah angka kecelakaan ini meningkat dibandingkan tahun 2011.

Korban meninggal sampai dengan 27 Agustus 2012 sebesar 908 jiwa, meningkat 17 persen dari tahun 2011. Sedangkan total kecelakaan lalu lintas sebesar 7.870 kejadian dan melibatkan pengguna sepeda motor sebesar kurang lebih 70 persen atau sebesar 5.634 kejadian.

Hal ini tentunya perlu dicarikan solusinya agar angka kecelakaan di tahun-tahun mendatang dapat diminimalisir.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengatakan, untuk keselamatan pemu- dik pengguna roda 2 (sepeda motor), pihaknya telah menghimbau masyarakat melalui media elektronik, cetak, leaflet dan brosur untuk tidak mudik dengan sepeda motor karena tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh.

Pihaknya juga telah mengeluarkan kebijakan, pengalihan pengangkutan sepeda motor dengan sarana lain secara gratis (kapal KRI Banda Aceh tujuan Jakarta-Semarang : 1.000 unit sepeda motor dan truk ke berbagai tujuan oleh Astra Honda Motor ; 1.100

unit sepeda motor).

Untuk sepeda motor ini, Pemerintah juga menyediakan jalur khusus sepeda motor pada ruas Karawang-Ciasem untuk mengurangi kepadatan arus di simpang Jomin arah Pantura.

Selain itu, juga disediakan tempat-tempat istirahat, sekaligus sebagai tempat pemeriksaan/bengkel motor. Namun yang tak kalah pentingnya, melakukan penegakan hukum terhadap pengguna sepeda motor yang lebih dari 2 (dua) orang di perbatasan Bekasi dan Tangerang.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan penyelenggaraan angkutan Lebaran di masa mendatang, dalam jangka pendek pihaknya mengusulkan menekan penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi mudik.

Guna menekan penggunaan sepeda motor ini, Pemerintah berencana menambah penyediaan sarana angkutan umum bus maupun KA yang nyaman dan aman untuk dapat menarik pengguna roda dua.

Pemerintah juga mendorong pengangkutan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) pihak swasta termasuk penambahan dukungan APBN dan APBD untuk menambah sa-



Suasana rapat kerja komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan

DPR dan Pemerintah Siap Bahas Perubahan UU Kejaksaan

Rapat pleno Komisi III DPR dengan pemerintah yang diwakili oleh Menkumham, Jaksa Agung dan Menpan RB sepakat segera membahas RUU tentang Perubahan atas UU no.16/2004 tentang Kejaksaan.



Rapat pleno komisi III DPR dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menkumham, Jaksa Agung dan Menpan RB

Perubahan ini untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus sebagai upaya menguatkan kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan RI.

“Pembaharuan UU tentang Kejaksaan RI ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya,” kata pimpinan sidang Nasir Djamil di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/12).

Materi muatan RUU lainnya menurut Wakil Ketua Komisi III ini diantaranya pelaksanaan rekrutmen jaksa harus dilaksanakan secara transparan, profesional dan akuntabel. Pengangkatan Jaksa Agung dilakukan setelah mendengarkan pertimbangan DPR, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Dibuka pula ruang untuk pengu-

tan Komisi Kejaksaan dalam rangka pengawasan terhadap perilaku Jaksa serta pelibatan dalam rekrutmen dan pelaksanaan diklat dalam rangka melahirkan jaksa berkualitas dan bermartabat. Disiapkan pula sanksi pidana bagi Jaksa yang melanggar larangan dan menyalahgunakan kewenangan/jabatannya.

Sementara itu dalam pandangan Presiden RI yang dibacakan Menkumham Amir Syamsudin ditekankan kesiapan pemerintah untuk membahas RUU yang merupakan usul inisiatif DPR. “Pemerintah siap membahas dalam rapat-rapat berikutnya sesuai kewenangan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Presiden menghargai konsistensi DPR yang memahami Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain secara merdeka. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan tetap harus diletakkan dalam kerangka sistem presidensiil sebagaimana tercermin

dalam pasal 4 ayat 1 UUD NRI tahun 1945.

Dalam kesempatan rapat tersebut pimpinan sidang menetapkan 27 orang anggota Panitia Kerja RUU tentang Kejaksaan Agung RI. Ketua Panja Gede Pasek Suardika FPD, Wakil Ketua 3 orang yaitu Aziz Syamsudin FPG, Nasir Djamil FPKS dan Tjatur Sapto Edy FPAN.

Anggota Panja, dari FPD Edi Ramli Sitanggang, Ruhut Sitompul, Himatull Alyah Setiawaty, Subyanto, Harry Witjaksono, Khatibul Imam Wiranu. Kemudian dari FPG, Nudirman Munir, Deding Ishak, Bambang Soesatyo, Mahyudin. FPDIP, Trimedya Panjaitan, Herman Hery, Eva Kusuma Sundari dan Sayed Muhammad Muliyadi.

Sedangkan anggota Panja dari FPKS, Buchori, Aboe Bakar Al Habsy. FPAN, Taslim dan Andi Anzhar Cakra Wijaya. FPPP, Ahmad Yani dan Dimiyati Natakusumah. Selanjutnya FPKB Bahrudin Nasori, FP Gerindra Desmond J. Mahesa dan FP Hanura Sarifuddin Sudding. (iky)foto:wy/parle

Komisi XI DPR Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola APBN

Sejumlah anggota Komisi XI DPR mendesak Pemerintah memperbaiki APBN baik dari sisi tata kelola maupun implementasinya.

“Saya melihat penyelenggaraannya tidak begitu optimal kemudian data-data dari BPS harus dikaji dan diolah kembali, baik tingkat inflasi, pengangguran dan sebagainya,” jelas anggota DPR dari Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon, saat Raker dengan Kementerian Keuangan Agus Martowardojo, Kepala Bapennas Armida Alisjahbana, Gubernur BI Darmin Nasution maupun jajaran BPS, dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis membahas mengenai asumsi makro RAPBN 2013, di Gedung Nusantara I, Rabu, (5/9).

Menurut Nurdin, kedepan perbaikannya harus menetapkan target dan ukuran yang jelas, kemudian daya saing. “Fokusnya bisa dilihat sesuai dengan kebutuhan wilayah dan masyarakat serta sumber dayanya,” paparnya.

Dia menambahkan, yang terjadi selama ini karena tata kelola yang belum beres karena itu, pemerintah harus membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan bangsa seperti prioritas sektor pertanian. “fokus satu item tanpa melupakan yang lain, misalnya DPR sudah mendesak untuk swasembada gula namun sampai sekarang fasilitas lahan belum tersedia,” ujarnya.

Nurdin menilai perencanaan Musrenbang dari tingkat terkecil masih belum maksimal dan komprehensif sehingga hasilnya APBN kita hanya menjalankan rutinitas kebiasaan saja. Khusus mengenai penyerapan, lanjutnya, Komisi XI DPR telah meminta penyerapan merata setiap bulan artinya jangan digenjot diakhir sehingga tidak terjadi multiplier efek kedepan. “karena itu perbaiki tata kelola anggaran dan implementasinya. jadi tercipta continuous improvement,” paparnya.

Sementara Arif Budimanta (F-PDIP)

mengatakan, inflasi bahan makanan harus dijaga dan dimasukkan lagi didalam UU, apalagi peran Bulog sudah ditingkatkan dibanding yang lalu. “Ini harus dijaga stabilitasnya sesuai amanat Presiden pada level 1-3 persen agar tidak menggerus daya beli masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur BI Darmin Nasution menjelaskan defisit transaksi berjalan hingga semester I-2012, diperkirakan akan berkurang menjadi sekitar 2 persen dari produk domestik bruto (PDB). “Perkiraan ini



Anggota DPR RI Nurdin Tampubolon (F-Hanura)



Kementerian Keuangan Agus Martowardojo, Kepala Bapennas Armida Alisjahbana, Gubernur BI Darmin Nasution dan jajaran BPS saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR

didasarkan pada ekspektasi bahwa kondisi perekonomian global dan harga komoditas ekspor akan membaik serta didukung oleh respon kebijakan yang ditempuh oleh BI dan pemerintah,” kata Darmin

Menurut Darmin, nilai tukar rupiah itu juga sejalan dengan meredanya ketidakpastian global. Sehingga akan mendorong arus modal masuk yang lebih tinggi dan pada gilirannya meningkatkan surplus neraca modal dan finansial. “Sejalan dengan perkembangan ini, nilai tukar pada sisa tahun 2012 diperkirakan berada pada kisaran Rp 9.200-Rp 9.400 per dollar AS. Bias ke atas,” katanya. (si) foto:wy

Komisi I Dukung Dana Optimalisasi Anggaran Kemhan

Ketua Komisi I DPR RI mendukung penggunaan dana optimalisasi Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada APBN-P 2012 sebesar Rp 678 miliar.



Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq (tengah) memimpin rapat kerja Komisi I DPR dengan Menhan dan Panglima TNI

Pada kesempatan itu, Komisi I meminta kepada Kementerian Keuangan untuk mencabut surat pembintangan untuk penambahan anggaran yang berasal dari pemanfaatan optimalisasi dan non pendidikan sebesar 480 miliar, program modernisasi alutsista/non-alutsista/sarpras integrative dan sebesar 198 miliar pada program modernisasi alutsista, dari non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra laut.

Dalam Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Agus Suhartono, di Gedung DPR, Rabu (5/9).

Raker membahas dana optimalisasi Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2012 sebesar Rp.678 miliar serta pemberangkatan tiga unit Mi-17 ke Kongo dalam rangka penguatan pasukan perdamaian Indonesia di Kongo,

dan penyelesaian 21 pengadaan alutsista yang menjadi prioritas.

Mahfudz mengatakan, Kemhan pada RAPBN 2013 diusulkan mendapatkan anggaran sekitar Rp 77 triliun, atau meningkat Rp 5 triliun dari anggaran di 2012. "Dengan peningkatan anggaran itu, maka dana optimalisasinya juga diperkirakan meningkat namun besarnya berapa belum tahu, tergantung dalam pembahasan nantinya di Komisi dan Banggar," ujarnya.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, Kemhan telah menyusun 21 kegiatan prioritas pengadaan alutsista bagi TNI. Lima program di antaranya secara pendanaan telah disetujui oleh Komisi I DPR atau tanda bintangnya telah dicabut.

"Untuk TNI AD pengadaan helikopter angkut, dari TNI AL untuk pengadaan Tank Amfibi BMP-3F. Dari TNI AU untuk pengadaan enam pesawat

Sukhoi 30 MK2, pesawat pengganti MK-53, dan pesawat pengganti F-27 beserta dukungannya yaitu pesawat CN-295," ujar Menhan.

Lebih lanjut Menhan mengatakan, 16 prioritas dalam pengadaan alutsista yang belum mendapat persetujuan Komisi I DPR RI, masih ada dua kegiatan, dua kegiatan masih berada di Kemenkeu, dan 12 kegiatan lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi.

"Dua kegiatan yang masih di Komisi I DPR yaitu dari TNI AD untuk pengadaan heli serbu beserta persenjataannya dan amunisinya. Dari TNI AU, untuk pengadaan enam Helikopter Full Combat SAR Mission EC 725. Sementara dua kegiatan yang masih di Kemenkeu adalah pengadaan Rudal Arhanud ME-Armed 155," ujarnya.

Sementara, kata Menhan, dari 12 kegiatan yang masih proses penyelesaian administrasi itu, dari Mabes TNI untuk pengadaan Rantis 2,5 ton 4X4, kendaraan angkut, dari TNI AD heli serang beserta persenjataan dan amunisinya, ranpur MBT, rudal MLRS. Sedangkan dari TNI AL adalah MLM KRI kelas korvet tahap I, kapal bantu hidro oseanografi, kapal latihan pengganti Dewa Ruci, CN 235 MPA, Heli AKA-S antikapal selam dan suku cadangnya, panser Amfibi BTR 80-A, dan Multiple Launch Rocket System (MLRS).

Sementara itu Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menambahkan, per 31 Agustus 2012, Komisi I telah menyetujui alokasi anggaran untuk pengadaan kapal selam elektrik tiga unit, yang pengadaannya dari Korsel dan pengadaan enam unit Sukhoi. "Sementara untuk pengadaan MBT Leopard dari Jerman, juga mendukungnya dan dalam proses administrasi soal persetujuannya," tegas Mahfudz. (as)foto:parle

Komisi VIII DPR Nilai Kordinasi Antar Lembaga Minim

Komisi VIII DPR menilai minimnya kordinasi antar lembaga pemerintah sehingga pelaksanaan program untuk tahun 2013 diprediksi tidak maksimal tanpa sinergi. Karena melalui koordinasi yang intensif dari kementerian-kementerian dan badan terkait program dapat berjalan semakin efektif dan berkesinambungan.

Hal itu mengemuka saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan jajaran Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rabu serta Kepala BNPB Rabu, (5/9) di Ruang Rapat Komisi VIII.

Menurut Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS), kebijakan yang diambil sudah seharusnya mengacu pada tema pembangunan nasional 2013 nanti. “Nah ini kenapa saya banyak menanyakan soal koordinasi, karena itu tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada koordinasi antar kementerian lembaga, baik itu antara BNPB dengan Kementerian Sosial, Menteri Agama dengan kementerian Sosial dan seterusnya”, katanya seuai Raker tersebut

Menurutnya jawaban-jawaban pemerintah terhadap pandangan Fraksi adalah mengarah pada perlunya melakuakan efisiensi dan efektivitas pada program semaksimal mungkin. “Kita harapkan program bisa terimplementasi sampai ke hal-hal detail,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia memaparkan DPR RI mengapresiasi langkah yang dilakukan Menteri PP dan PA bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Sosial membuat nota Kesepahaman Bersama 8 Menteri tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran. Halitu berdampak terbitnya 308 peraturan di daerah tingkat kabupaten kota baik dalam bentuk pe-raturan daerah maupun peraturan bupati tentang Akte lahir bebas bea.

“Kebijakan ini merupakan wujud dari perlindungan anak oleh pemerintah ini merupakan salah satu kebijakan yang perlu koordinasi tinggi, karena melibatkan banyak lembaga,”ujarnya.



Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS)



Suasana rapat kerja komisi VIII DPR dengan jajaran Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rabu serta Kepala BNPB

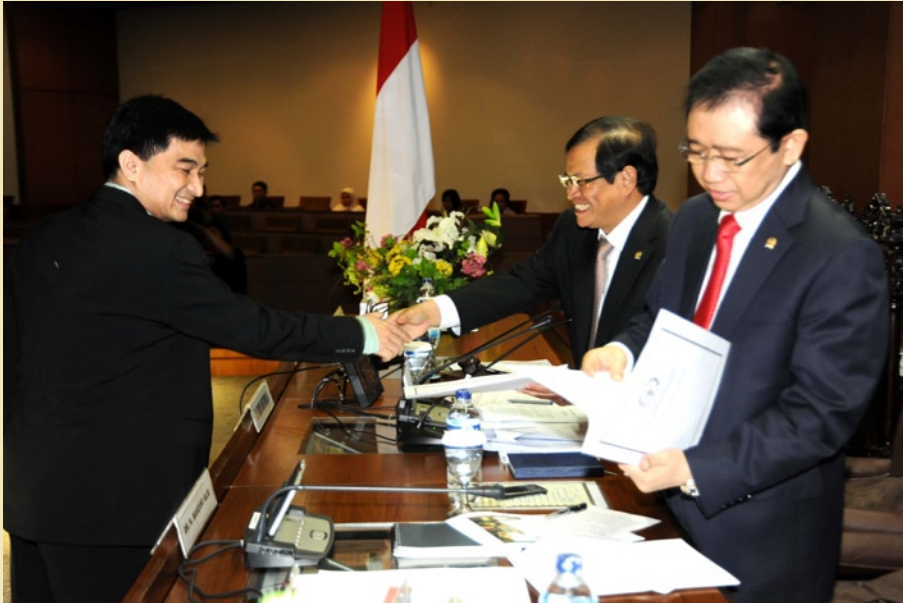
Dia menambahkan, Akta gratis itu sendiri terfokus dalam koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Didalam aturan itu, lanjutnya, terdapat aturan dimana akte harus selesai dua bulan pembuatannya hingga sampai ke Pengadilan Negeri untuk membuktikan bahwa dia anak orang tuanya. “Itu semua memakan biaya lebih besar,

karena itu perlu kerjasama matang dari lembaga tersebut,”katanya.

Menurutnya, koordinasi dapat berjalan bagus apabila pemerintah berhasil mengimplementasikan program kerja antar lembaga yang meliputi pembagian kerja maupun anggaran. (ray)

Baleg Sampaikan Penambahan Lima RUU

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan tambahan 5 (lima) Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2012 yang usulan penambahannya diajukan dari Komisi, Anggota DPR dan Pemerintah.



Wakil Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah saat memberikan laporannya kepada Pimpinan DPR RI



Wakil Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah

Ke lima RUU tersebut adalah RUU tentang Kesehatan Jiwa yang diusulkan Komisi IX DPR, RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional dan RUU tentang Kebudayaan yang diusulkan Komisi X DPR, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diusulkan 22 orang Anggota DPR dan RUU ten-

tang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diusulkan dari Pemerintah.

Penambahan RUU tersebut disampaikan Wakil Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (30/8) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

Dalam laporannya Dimiyati menyampaikan, terkait dengan RUU usulan Pemerintah, Badan Legislasi memberikan catatan karena RUU ini sebelumnya belum pernah diusulkan oleh Pemerintah untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2012.

Namun Pemerintah sudah langsung menyampaikan RUU ke DPR dan DPR menindaklanjuti dengan menunjuk Pansus untuk melakukan pembahasan bersama Pemerintah (bahkan sudah memasuki tahap Pembicaraan Tingkat I).

Dimiyati menambahkan, Prolegnas menjadi dasar pengajuan RUU baik dari DPR, Presiden, maupun DPD. Kendati

demikian, masih dimungkinkan bagi DPR dan Presiden mengajukan RUU di luar Prolegnas yang sudah ditetapkan dengan alasan "keadaan tertentu", sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011.

Keadaan tertentu yang dimaksudkan Pasal 23 ayat (2) tersebut adalah untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (Baleg) dan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum (Kemenkumham).

Baleg pada tanggal 3 Juli 2012 telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan telah menyepakati usulan ke lima RUU tersebut.

Dengan adanya perubahan ini, kata Dimiyati, maka Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012 mengalami perubahan dari yang semula berjumlah 64 RUU dan 5 (lima) daftar RUU Kumulatif Terbuka menjadi 69 RUU dan 5 (lima) daftar RUU Kumulatif Terbuka.

Dimiyati menyadari dengan adanya penambahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012 tentunya beban legislasi tahun 2012 cukup berat. Namun dia optimis dengan tekad bersama antara DPR dan Pemerintah untuk menyelesaikan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012 tentunya target Prolegnas yang disepakati bersama akan tercapai.

Oleh sebab itu dia berharap dukungan dari Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Fraksi agar penambahan Prolegnas dapat direalisasikan sesuai rencana, sehingga dapat menjadi sumbangan penting dalam peningkatan kinerja DPR.(tt)/foto:iwan armanias/parle.

Pembangunan P3SON Hambalang Tidak layak Dilanjutkan

Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang tidak layak untuk dilanjutkan.



RDPU Komisi X DPR RI dengan Tim Ahli Teknik Sipil UI dan ITB yang dipimpin oleh Agus Hermanto

Demikian yang dikatakan anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar, saat RDPU dengan Tim Ahli Teknik Sipil UI dan ITB yang dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto, di Gedung DPR, Senin (3/9) siang.

Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar menambahkan, pembangunan Proyek tersebut seharusnya sudah bisa diperkirakan apakah bangunan tersebut layak dan bangunan yang tidak layak dipakai, serta apabila ada bangunan yang memang tidak layak harus segera dibongkar.

“Harus segera dibongkar daripada membahayakan masyarakat kedepan, dan apabila ada bangunan memang layak digunakan ya segera diselesaikan,” ujar Raihan.

Raihan juga mengatakan masalah proyek Hambalang tersebut perlu ada ketegasan jangan sampai bangunan nantinya membahayakan masyarakat ke depan. “jangan sampai kita malu yang berkepanjangan, kalo malu ya malu sekali saja, jangan sampai nanti gedung tersebut rubuh jadi berita terus kita malu lagi disebut-sebut lagi dan

saling menyalahkan,” kata Raihan.

Sementara Tim Ahli Teknik Sipil Universitas Indonesia Widjojo A Prakoso mengatakan, P3SON yang telah dibangun tidak mubazir, artinya semua pemangku kepentingan perlu memahami kondisi khusus tersebut sehingga dapat memiliki sikap yang kompatibel dengan kondisi khusus ini.

Tim Ahli teknik Sipil UI Widodo menambahkan, bahwa konstruksi dan pemeliharaan reguler infrastruktur kompleks P3SON yang berada di daerah dengan material napal dan serpih lembungan akan memerlukan usaha dan dukungan sumber daya yang lebih besar daripada konstruksi dan pemeliharaan reguler infrastruktur serupa di daerah dengan material pada umumnya.

pada kesempatan itu, Tim Ahli Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB Bandung, Dr. Ir. I Wayan Sengara mengatakan, kelongsoran dan pergerakan tanah pada beberapa lereng yang terjadi pada proyek P3SON Hambalang menunjukkan bahwa terjadi kegagalan design dan konstruksi stabilitas



Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar

lereng, di mana angka keamanan (Factor of Safety, Fos) lereng mencapai nilai < 1.0

Kegagalan stabilitas lereng pada Power House (yang paling parah telah merusak bangunan) melibatkan adanya exposure lapisan clayshale, sedangkan pergerakan/kegagalan lereng pada lokasi-lokasi lain terjadi pada lapisan tanah atas atau timbunan dan tidak sampai menyebabkan kerusakan/kegagalan bangunan, kata Wayan. (Spy).

Pangkalan Militer AS di Darwin Dipertanyakan

Sejumlah anggota DPR mempertanyakan kehadiran pangkalan militer (marine base) AS di Darwin.



Jajaran BKSAP DPR RI saat menerima delegasi Parlemen Australia di Gedung Nusantara III DPR

Hal itu mengemuka saat Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Sidarto Danusubroto menerima delegasi parlemen Australia yang dipimpin oleh Alan Griffin, di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa, (4/9).

“soal Marine base di Darwin kita minta hanya untuk latihan bukan yang

lain jangan sampai untuk melindungi kepentingan Freeport nantinya,” tegas Wakil Ketua BKSAP Sidarto Danusubroto kepada Parle.

Dia menambahkan, pertemuan tersebut juga membahas mengenai soal Papua, dan DPR meminta kepada delegasi parlemen Australia untuk memberikan dukungan terhadap NKRI.

“Mereka Australia umumnya responsif soal itu,” ujarnya.

Menurut Sidarto, DPR percaya hubungan kedua negara dapat semakin kuat dengan peningkatan kerjasama B to B tetapi juga People to People maupun antar Parlemen. “Saat sidang antar parlemen kita juga sempat membahas mengenai Isu konflik Cina Selatan kita ingin meminta tanggapannya terhadap isu tersebut,” paparnya.

Hal senada disampaikan oleh Evita Nursanty (F-PDIP), dirinya Ingin meminta penjelasan terkait posisi parlemen dan pemerintah Australia terhadap isu penempatan marine base di Darwin dan keterkaitannya dengan isu Papua. Selain itu, dirinya juga berharap pelajar Indonesia mendapatkan kemudahan dalam mengurus Visa belajarnya ke Australia, karena banyak keluhan sulitnya mengurus persoalan itu.

Dia mengharapkan, Australia juga dapat memberikan dukungan dan kerjasamanya terhadap alih teknologi di bidang pertanian serta peluang peningkatan kerjasama antar kedua negara.(si)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi IV DPR Pertanyakan Rendahnya Serapan Anggaran Kemenhut

Komisi IV DPR RI mempertanyakan penyerapan APBN Tahun 2012 Kementerian Kehutanan yang sangat kecil. Pasalnya, anggaran Kementerian Kehutanan sebesar Rp 5,68 Trilyun baru terealisasi sampai dengan Agustus 2012 sebesar Rp 2,35 Triliun atau 41,41%.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Firman Soebagyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9)

Dalam sisa waktu tiga bulan ini, dipertanyakan bagaimana Kementerian Kehutanan menyerap anggaran yang masih begitu besar tersebut.

Anggota Komisi IV DPR RI Marsanto (F-PDIP) menilai hal ini kemungkinan disebabkan tidak adanya Net Pogress Schedule (NPS). Dijelaskan Marsanto, biasanya dalam program NPS setiap triwulan dibagi habis. Misalnya triwulan pertama 20 persen, triwulan Kedua 30 persen, Ketiga 30 persen terakhir 20 persen sehingga diharapkan ada pegangan bagi pejabat dibawahnya

bagaimana merealisasikannya.

Dirinya merasa tidak yakin penyerapannya jika saat ini baru 40 persen, kemudian tiga bulan berikutnya dapat mencapai 90 persen.” Kemungkinan di akhir tahun akan banyak kegiatan dan program yang disegerakan yang nilainya tidak efektif dan tidak efisien,”ujarnya.

Dia mengharapkan, pada tahun 2013

tidak terulang kembali hal semacam ini. karena dengan adanya NPS, lanjutnya, akan lebih terarah. sementara di 2013 Menteri Kehutanan akan lebih banyak memberikan perhatian khususnya pada penggunaan anggaran.

Sementara Rosyid Hidayat (FPG) meminta Kementerian Kehutanan memberikan perhatian khusus dalam hal penyerapan anggaran 2012 ini.

Dalam paparannya Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan berdasarkan APBNP Tahun Anggaran 2012 Anggaran Kementerian Kehutanan sebesar Rp 5,68 Trilyun sampai Agustus 2012 baru terealisasi sebesar Rp 2,35 Triliun atau 41,41%.

Dengan rincian program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 154,15 Milyar, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara Kementerian Kehutanan sebesar Rp 29,21 Milyar atau 54,72%, program peningkatan usaha kehutanan sebesar Rp 136,86 Milyar atau 51,01%, program peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis pember-



Anggota Komisi IV DPR RI Marsanto

dayaan masyarakat sebesar Rp 843,74 Milyar atau 34,8%.

Sementara untuk program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan sebesar Rp 687,13 Milyar atau 47,03%, program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sebesar

Rp 259 Milyar atau 41,06%, program penelitian pengembangan kementerian kehutanan sebesar Rp 147,99 Milyar atau 59,66%, program penyuluhan dan pengembangan bidang kehutanan sebesar Rp 97,12 Milyar atau 45,9%.

(sc)foto:wy/parle

DPR Setujui RUU KDIY Menjadi UU

Setelah mengalami pembahasan yang cukup lama, akhirnya Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengetok palu sebagai bentuk persetujuan DPR terhadap RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (KDIY) tersebut.

“Kami ingin menanyakan apakah secara keseluruhan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disahkan menjadi UU,” Tanya Pramono, kemudian dijawab setuju oleh seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat Paripurna DPR, Kamis, (30/8).

Sementara itu menurut, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar dalam laporannya mengatakan, dengan disetujuinya RUU KDIY ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai polemik yang muncul selama ini, bahkan perpanjangan Sultan Hamengku Buwono X menjadi Gubernur DIY yang telah dilakukan 2 (dua) kali sejak tahun 2008 lalu hingga Tahun 2012 ini untuk tidak perlu diperpanjang lagi, namun dilakukan mekanisme penetapan.

“Oleh karena itu, kami persembahkan RUU KDIY ini kepada seluruh masyarakat Yogyakarta tanpa tersekat dalam kelompok-kelompok tertentu, Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan Adipati Paku Alam yang bertakhta adalah milik seluruh masyarakat Yogyakarta dan bertugas mengayomi serta mensejahterahkan seluruh masyarakat Yogyakarta,” jelas Agun.

Agun menambahkan, dari sisi substansi, RUU ini dikonstruksikan sebagai suatu pengaturan terhadap Keistimewaan Yogyakarta yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan manapun.

“UU No.3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mengatur tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah setingkat Provinsi, oleh karena



Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar

itu UU No.3 Tahun 1950 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,”te rangnya.(nt)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Akan Jadi Tuan Rumah Sidang Umum AIPA Ke-33

DPR RI mendapat kehormatan akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Sidang Umum Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-33 yang akan diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang digelar mulai 16-22 September mendatang.



Ketua BKSAP DPR Surahman Hidayat

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Surahman Hidayat dalam keterangannya, Jum'at (31/8) di gedung DPR mengatakan, Lombok dipilih menjadi tempat pelaksanaan, sesuai dengan semangat diversifikasi daerah untuk penyelenggaraan event internasional dan regional. Selain itu, Lombok memiliki potensi pariwisata luar biasa yang tidak kalah cantiknya dengan Bali atau kawasan wisata lainnya di Indonesia.

Surahman menambahkan, sebagai sarana promosi pariwisata, Lombok dipandang layak untuk dipromosikan untuk mendorong peningkatan jumlah pengunjung wisatawan dari Asean ke Indonesia khususnya Lombok.

Anggota AIPA saat ini terdiri dari 10 parlemen negara. Sejak September

2011 Presiden AIPA dijabat Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Hingga berita ini diturunkan tercatat 291 peserta akan hadir dari 10 negara anggota AIPA, 9 (sembilan) Parlemen Negara Observer dan lima tamu tuan rumah. 4 (empat) Ketua Parlemen dari Negara anggota AIPA telah mengkonfirmasi akan hadir yakni dari Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan Thailand. Sementara 1 (satu) Wakil Ketua Parlemen yakni dari Vietnam akan hadir, sedangkan dari Cambodia, Laos, Myanmar, Philipines telah siap mengirim delegasinya.

Surahman mengatakan, Sidang Umum AIPA kali ini untuk pertama kalinya mencantumkan tema besar "Strengthening the Parliamentary Roles Towards Asean Community

2015".

Tema ini, kata Surahman, diambil mengingat DPR memiliki perhatian mendalam mengenai peran dan apa yang bisa parlemen lakukan dalam mewujudkan komitmen regional pembentukan Komunitas Asean 2015.

Forum AIPA dipandang tepat untuk mendiskusikan peran keparlemenan seperti apa yang bisa dilakukan oleh para anggota parlemen dan parlemen dari negara Asean dalam berkontribusi terhadap perkembangan berbagai isu yang ada di Asean.

Pada Sidang Umum nanti, beberapa agenda yang telah ditetapkan akan terbagi dalam enam sesi, yakni Komite Politik, Komite Ekonomi, Komite Sosial, Komite Organisasi, Dialog dengan Observer dan juga Women AIPA.

Di bidang politik, isu yang akan dibahas adalah mengenai upaya untuk meningkatkan kesadaran publik terkait Asean Community dan isu Laut China Selatan. Adapun isu Rohingya tidak dibahas secara spesifik, karena memang dalam pertemuan Komite Eksekutif Juli lalu di Yogyakarta, hal tersebut tidak diangkat sebagai agenda Sidang Umum ke-33 oleh para delegasi yang hadir.

Namun, kata Surahman, pembahasan soal Rohingya tidak menutup kemungkinan dibicarakan secara bilateral dengan Parlemen Myanmar yang telah mengkonfirmasi bakal hadir pada sidang ini.

Di Bidang ekonomi, pembahasan akan berfokus pada upaya penguangan kemiskinan, kerjasama dalam pemberantasan pencucian uang, pemberdayaan UKM dan juga Green Economy.

Di Bidang Sosial, isu yang akan dibahas berfokus pada kesadaran publik terhadap upaya penanggulangan

bencana dan juga mengenai Low Carbon. Beberapa isu lainnya seperti peningkatan SDM dan kerjasama multilateral dalam isu Laut China Selatan akan dibahas bersama dalam dialog dengan Parlemen Negara Observer.

Lebih jauh Surahman menjelaskan, terkait Women AIPA, isu-isu spesifik mengenai perempuan seperti pemberdayaan perempuan di perdesaan akan didiskusikan secara mendalam dalam forum ini.

Menurut Surahman, beberapa isu terlihat sangat menarik, bahkan cukup up to date dengan perkembangan Asean dewasa ini, seperti isu Laut China Selatan. Seperti diketahui, pertemuan Asean di Kamboja gagal menuju kata sepakat karena isu ini.

Di tangan kebuntuan tersebut, Indonesia perlu untuk tampil sebagai figur pemersatu sikap di kawasan Asean. Indonesia perlu hadir dengan menawarkan sikap dasar, titik kesamaan dalam konteks isu tersebut.

DPR mencoba menawarkan sejumlah alternatif yang dapat menjadi pelengkap preventive diplomacy yang dijalankan Indonesia. Salah satu alternatif yang ditawarkan, selain seruan moral untuk menahan diri dari aksi-aksi kekerasan dan militer, DPR juga mengusulkan perlunya pembentukan AIPA Eminent Persons Group (grup tokoh-tokoh penting) yang berasal dari ketokohan dan reputasi yang bebas dari pengaruh jabatan, maupun kepentingan.

Grup ini dapat berdiskusi, tukar pikiran dengan jernih dan bebas kepentingan sehingga dapat menjadi wadah baru yang dapat memecah kebuntuan politik kawasan.

Dalam sidang ini, DPR menawarkan kerja-kerja konkret dalam resolusi-resolusi AIPA. Kerja konkret ini tentunya untuk mendukung terwujudnya mimpi Komunitas Asean 2015.

Seperti, keinginan untuk menggapai dukungan politik untuk pembiayaan bagi UKM, di bidang Green Economy perlu mewujudkan sistem ekonomi yang riil memperhatikan lingkungan dan mendukung konsep tersebut melalui legislasi-legislasi yang pro green economy.(tt)/foto:iwan armanias/parle.

Sekretariat Parlemen Thailand Studi Banding ke DPR

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima kunjungan delegasi Sekretariat Parlemen Kerajaan Thailand dalam kegiatan studi banding untuk mengetahui lebih jauh keparlemenan di Indonesia dan sistem yang mendukungnya.



Suasana rapat Deputy Bidang Perundang-undangan Setjen DPR RI dengan Tim Studi Banding Sekretariat Parlemen Thailand di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta

“Indonesia telah menerapkan demokratisasi di segala bidang termasuk di parlemennya. Kita di-kesetjengan tentu siap berbagi pengalaman dengan setjen negara lain, termasuk Thailand ini,” kata Johnson Rajagukguk, Deputy Bidang Perundang-undangan Setjen DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/12).

Sementara itu, Ketua Tim Studi Banding Sekretariat Parlemen Kerajaan Thailand, Orawan Punprueng menyebut Indonesia adalah negara demokrasi besar yang patut dipelajari. “Indonesia adalah negara demokrasi besar, kita tertarik mengetahui lebih jauh bagaimana proses melayani kegiatan keparlemenan disini,” ujarnya.

Ia bersama 16 orang anggota delegasi menyampaikan apresiasi karena

telah mendapat sambutan yang baik dalam kunjungan ke Setjen DPR. Kerjasama ini menurutnya diharapkan dapat mendukung upaya bersama dalam mewujudkan Asean Community.

Studi Banding di Setjen DPR akan berlangsung selama 2 hari, 6-7 September. Mereka akan mempelajari proses legislasi termasuk bagaimana Deputy Bidang Perundang-undangan mendukung anggota dewan dalam persiapan dan pembahasan RUU.

Sekretariat Parlemen Kerajaan Thailand juga akan mendapat penjelasan mengenai jenis-jenis rapat, pengaturan komisi di DPR, proses dokumentasi serta upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung kerjasama antar parlemen. (iky)foto:wy/parle

DPR Harapkan Investasi Langsung Australia di Sektor Peternakan

Seusai mengadakan pertemuan dengan Pimpinan dan Anggota BKSAP, Komisi IV DPR juga menerima Delegasi Parlemen Australia, di Gedung Nusantara III DPR, Selasa (4/9), guna membahas isu-isu krusial seperti persoalan impor, pertanian dan peternakan.



Pimpinan dan Anggota BKSAP, Komisi IV DPR saat menerima delegasi Parlemen Australia di Gedung Nusantara III DPR RI

Investment (FDI) dari Australia ke Indonesia khususnya untuk investasi pengembangan sapi guna mendorong tercapainya swasembada sapi di Indonesia

Selain masalah ternak, Romi mengatakan, Indonesia juga masih mengalami defisit soal jagung dan kedelai dimana produksi nasional hanya mampu seperempat kebutuhan nasional dan tiga perempat masih impor dari Amerika Serikat. “Gula kita pernah swasembada 2006 karena tidak ada program berkelanjutan akhirnya impor,” ujarnya. Sementara, daging sapi impor Australia Juli 2012 setara 50 ribu ton.

Menurut Romi, Parlemen Indonesia sangat memperhatikan dan mengawasi tingginya importasi garam Australia Januari-Juli kurang lebih mencapai 2.1 juta ton. “Karena itu kita mengundang

dan mendorong kelebihan komparatif advantages terkait murahnya SDM dapat dimanfaatkan sesuai simbiosis mutualisme antar kedua negara,” ujarnya.

Terkait Indonesia yang masih impor, terangnya, DPR mendorong Larangan importasi karena ingin kemandirian di bidang pangan. “Kami bukannya tidak cinta Sama Australia tetapi kita ingin Petani kita semakin mandiri,” terangnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengharapkan Pertemuan ini dapat mempererat hubungan kedua negara. “Komisi IV akan menyelesaikan UU Pangan dimana didalamnya mengatur sistem perdagangan pangan, keterjangkauan pangan dan persoalan mendasar soal pangan. Kedepan kita akan merevisi UU Peternakan dan kesehatan hewan

dimana isu yang kita angkat meninjau kembali country base yang lebih terbuka di Indonesia,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagio mengatakan, Indonesia-Australia memiliki peran yang strategis karena itu diharapkan persoalan politis bisa diselesaikan antar kedua negara seperti banyaknya nelayan kita yang terdampar di Australia. “Terkait perbatasan Australia harapkan kerjasama politik dan ekonomi sama-sama menghargai kedaulatan kedua negara,” ujarnya.

Firman mengharapkan, kerjasama politik dan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan investasi. “Kerjasama investasi penting tidak bisa menutup terhadap produk yang lain,” terangnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Dukung Peningkatan Kerjasama Indonesia-Irak

DPR mendukung peningkatan kerjasama politik antara Indonesia-Irak. Demikian pendapat Wakil Ketua DPR Anis Matta saat menerima Duta Besar Irak HE Dr Ismail Shaafiq Muhsin.

“ Saya akan mendorong hubungan kerjasama Indonesia dengan Irak,” kata Anis Matta di Gedung DPR, Selasa (4/9).

Pada kesempatan itu, lanjut Anis, peningkatan kerjasama juga telah disponsori oleh Pemerintah dengan membangun Kedutaan Indonesia di Irak, selain itu, Pimpinan Parlemen dan Perdana Menteri Irakpun sudah berkunjung ke Indonesia. “Indonesia mulai mengintensifkan hubungan dengan Irak untuk memperkuat kerjasama,” jelasnya.

Menurutnya, Ada banyak produk Indonesia yang dapat dipromosikan di Irak, seperti Ban dan produk permintaan Indonesia lainnya seperti bidang Pertanian. Selain itu, Anis Matta juga mendorong kerjasama dibidang perminyakan, seperti PT. Pertamina yang telah ikut tender untuk mengoperasikan kilang yang ada di sana.

Sebelumnya, saat kunjungan Muhibah ke Parlemen Irak, Ketua DPR RI Marzuki Alie menandatangani Mutual Of Understanding (Mou) Atau Nota Kesepahaman Antara Kedua Parlemen Negara Sahabat. Nota Kesepahaman Tersebut Ditandatangani Oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie dan ketua Parlemen Irak Usama Abdul Aziz Nujayfi yang disaksikan oleh anggota parlemen Irak.

Nota tersebut berisi antara lain, pertama, kedua belah pihak menekankan atas keinginan bersama membangun hubungan bilateral dan menyesuaikan sikap terhadap masalah-masalah dunia melalui komunikasi tingkat pejabat tinggi, konsultasi, meningkatkan reaksi dan dukungan bersama pada isu-isu penting Internasional dan secara rutin menyelenggarakan pertemuan dan konsultasi diantara kedua belah pihak dalam kegiatan-kegiatan Internasional, Konferensi dan lain sebagainya.



Wakil Ketua DPR RI Anis Matta saat menerima Duta Besar Irak HE Ismail Shaafiq Muhsin

Kedua yaitu, kedua belah pihak bersepakat untuk berpartisipasi dalam membangun upaya-upaya bersama diantara kedua parlemen dalam bidang-bidang sebagai berikut : Kerjasama Pertukaran Pengalaman Di Berbagai Sektor Dan Tingkatan Di Bidang Legislatif, Hukum Dan Administratif Serta Kerjasama Antara Komite Dalam Kedua Parlemen Di Seluruh Bidang.

Kemudian berusaha, meningkatkan Hubungan Antara Komite Persahabatan Parlemen Dan Membangun

Kerjasama Yang Erat Antara Kedua Parlemen Termasuk Pertukaran Kunjungan. selain itu, adanya kerjasama pertukaran keahlian dalam hal mekanisme kerja mengenai peran pengawasan parlemen dan penyusunan Anggaran Belanja Umum Dan Khusus serta mekanisme pengawasan atas pelaksanaannya dan memperkuat kemampuan kedua Parlemen di Bidang tersebut melalui pelaksanaan pelatihan dan lokakarya. (as)foto:wy/parle



Pimpinan Komisi VIII DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri PP dan PA serta Ketua BNPB membahas RKA-K/L Tahun 2013 di Gedung Nusantara II DPR RI. Rabu (05/09), Foto: Iwan Armanias



Wakil Ketua DPR/Korinbang Pramono Anung menerima delegasi Aliansi Republik Demokrat masalah PT. Freeport di Gedung Nusantara III DPR RI. Kamis(06/09), Foto: Iwan Armanias



Ketua DPR RI Marzuki Alie membuka pagelaran wayang kulit dalam rangka HUT DPR RI Ke 67 di lapangan bola Gedung DPR RI. Sabtu(01/09), Foto: Wahyu

